



APDESI Minta Jaksa dan Polisi Bekerja Profesional

■ Arif dalam Proses Hukum Laporan Dana Desa

KAPUAS HULU - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kapuas Hulu, Yusuf Basuki, sangat berharap kepada Kejari Kapuas Hulu dan Polres Kapuas Hulu, agar tidak mudah secepatnya menampung laporan tentang pengelolaan dana desa baik dari BPD yang ada di desa maupun masyarakat.

"Dimana kadang-kadang mereka tidak tahu mekanisme dari pada penggunaan dana desa (DD), apalagi sekarang sudah pakai sistem keuangan desa (siskeudes), yang hanya bisa dipahami oleh pemerintah desa, itupun kemungkinan hanya Kades, Sekdes, Kaur Keuangan atau operator yang ada di desa, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa," ujarnya, Rabu 3 Maret 2021.

Lanjut dijelaskannya, itupun ada bagiannya yang dinamakan dengan Pembinaan Administrasi Desa atau Kabid PAD itu sendiri. "Maka banyak sekali laporan yang sebenarnya hanya ketidaktahuan mereka melapor kepada APH, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan," ucapnya.

Menurutnya, pada hal kegiatan atau program yang dilaporkan itu

belum di periksa kebenarannya oleh APIP yaitu inspektorat, maka pihaknya selalu menerima keluhan para kepala desa. "Akibat dari itu, bahkan ada mereka yang ingin mengundurkan diri Kades, karena merasa ketidak nyamanan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa masing-masing, karena selalu ada rasa ketakutan," ujarnya.

Dimana kata Yusuf, tidak sedikit rekan-rekan kades yang sudah berurusan ke pihak yang berwajib, baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan, termasuk berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas, kades, aparatur desa BPD atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

"Yang punya andil untuk menjadi pilar pembangunan desa, seperti kegiatan bimtek itu sangat penting sekali bagi kami pemerintah desa, karena dengan kegiatan bimtek baik dalam daerah maupun luar daerah itu sangat menguntungkan kami, dalam upaya meningkatkan SDM pemerintah desa, sehingga dengan sering diadakan kegiatan bimtek sekarang sudah banyak desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang IDM nya naik peringkat dari sangat tertinggal menjadi tertinggal dari terting-

gal menjadi berkembang, dari berkembang menjadi maju, dan desa mandiri," ucapnya.

Hal tersebut jelas Yusuf, tidak bisa dilakukan kalau SDM dari kadesnya sampai ke aparatur desa mempunyai SDM yang minim. "Kalau melihat data desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2020 ini, sudah tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal, itulah salah satu faktor utama peningkatan kapasitas itu sangat penting dan sangat diperlukan oleh kami pemerintah desa," ujarnya.

Terkait kegiatan tersebut, kata Yusuf, bukan atas perintah atau instruksi dari pihak dinas PMD, karena tidak ada Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) yang mengurus kegiatan tersebut. "Dimana pihak dinas PMD hanya mendukung karena kegiatan tersebut benar-benar sangat bermanfaat bagi kami, serta melakukan pengawasan agar anggaran tidak fiktif," ucapnya.

Dijelaskan, kegiatan bimtek ini juga selalu pengurus DPC APDESI Kabupaten Kapuas Hulu juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut, apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak itulah bagian dari tugas pengurus DPC APDESI. **(rul)**